



Peran Perencanaan Keuangan dalam Mendukung Efektivitas Operasional Sekolah

Restu Agung Santoso¹, Ummi Mardiyah^{2*}

^{1,2} UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

Korespondensi penulis: ummi.mardiyah@uinsa.ac.id

Abstract. *Good financial planning can create operational effectiveness in educational institutions. This article analyzes the importance of financial planning in school management, covering aspects such as the development of facilities and infrastructure, the improvement of student learning quality, and teacher welfare. The research method used is quantitative with a library research approach, where data is obtained from various scholarly articles and relevant books sourced from Google Scholar. The findings indicate that schools effectively apply for funding and evaluate fund utilization annually. Poor financial planning can disrupt school operations, leading to issues such as delayed teacher salaries, insufficient learning facilities, and other challenges. To achieve effective financial management, technological mastery is essential to ensure operations that are effective, efficient, and accountable.*

Keywords: Finance, Operations, School, Technology, Unit cost

Abstrak. Perencanaan keuangan yang baik mampu menciptakan efektivitas operasional di lembaga pendidikan. Artikel ini menganalisis pentingnya perencanaan keuangan pada pengelolaan sekolah yang mencakup aspek pengembangan sarana dan prasarana, peningkatan kualitas pembelajaran siswa, serta kesejahteraan guru. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*), yang di mana data diperoleh dari berbagai artikel ilmiah dan buku yang relevan yang diperoleh dari *google scholar*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sekolah setiap tahun secara efektif mengajukan dana dan melakukan evaluasi penggunaan dana. Perencanaan yang buruk dapat mengakibatkan operasional sekolah terganggu, seperti penundaan gaji guru, kurangnya sarana pembelajaran, dan lain-lain. Untuk menciptakan pengelolaan keuangan yang baik diperlukan penguasaan teknologi agar mampu mewujudkan operasional yang efektif, efisien, dan akuntabel.

Kata kunci: Keuangan, Operasional, Sekolah, Teknologi, Biaya per unit

1. LATAR BELAKANG

Perencanaan keuangan harus disusun sebaik mungkin karena berperan penting dalam pengelolaan pembiayaan sekolah, yang terdiri dari biaya operasional, biaya personal, dan aspek lainnya. Tanpa perencanaan yang baik, sekolah dapat menghadapi berbagai tantangan, seperti kekurangan dana, ketidak efisienan dalam pengelolaan anggaran, dan bahkan kegagalan dalam mencapai tujuan pendidikan. Oleh karena itu, perencanaan keuangan yang terstruktur dan komprehensif menjadi fondasi utama dalam menciptakan sistem pendidikan yang efektif dan berkelanjutan (Albab, 2021).

Perencanaan keuangan yang terstruktur memudahkan sekolah dalam menyusun anggaran tahunan, mengajukan bantuan dana ke pemerintah atau lembaga swasta, serta melakukan evaluasi terhadap penggunaan dana yang telah dialokasikan. Melalui perencanaan yang matang, sekolah mampu mengidentifikasi kebutuhan sarana dan

prasarana yang tidak hanya mendukung pembelajaran siswa, tetapi juga memfasilitasi para guru dan karyawan sebagai penunjang kinerja (Masbullah et al., 2023).

Perencanaan keuangan juga harus melibatkan teknologi untuk memudahkan dalam tata kelola serta meminimalisir adanya kecurangan atau penggelapan dana (Ratna Sari & Listiadi, 2021). Penggunaan sistem keuangan berbasis teknologi memungkinkan sekolah untuk mencatat, mengelola, dan melaporkan keuangan secara lebih akurat dan transparan. Perencanaan keuangan yang baik tidak hanya mendukung operasional sekolah dalam jangka pendek, tetapi juga memastikan keberlanjutan program pendidikan dalam jangka panjang. Dengan demikian, sekolah dapat terus berkembang dan memberikan layanan pendidikan yang berkualitas kepada masyarakat (Hafni & Rahmawati, 2022).

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini merupakan jenis kualitatif dengan melakukan studi kepustakaan (*library research*), data diperoleh dari google scholar yang kemudian dianalisis dengan menelaah berbagai artikel ilmiah dan buku yang relevan dengan topik yang dibahas (Ali & Limakrisna, 2013).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi Operasional Satuan Biaya

Biaya operasional adalah instrumen dalam penyelenggaraan pendidikan yang tidak berdiri sendiri dan selalu dikaitkan dengan kegiatan produksi pokok. Dalam penyelenggaraan sekolah, pembelajaran adalah produksi utama, artinya bagus atau tidaknya pembiayaan dilihat dari sejauh mana biaya mendukung proses pembelajaran. Biaya operasional pada dasarnya merupakan suatu proses penggunaan sumber dana untuk operasional pendidikan dalam proses belajar dan mengajar (Alifia Taufika Rahmah et al., 2023).

Satuan biaya pendidikan adalah ukuran kebutuhan finansial yang dibutuhkan oleh tiap pelajar tiap tahun (Hasanah et al., 2022). Ketentuan mengenai standar pembiayaan diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 18 Tahun 2023 tentang Standar Pembiayaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah. Peraturan ini mencakup ketentuan umum, biaya investasi, biaya operasional, perhitungan satuan biaya pendidikan, dan ketentuan penutup.

Biaya pendidikan, menurut Supriyadi, merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Istilah ini mencakup berbagai jenis pengeluaran, baik dalam bentuk uang, barang, maupun tenaga yang digunakan untuk mendukung proses pendidikan (Nurhayati et al., 2022).

Sementara itu, Supriyono mendefinisikan biaya sebagai pengorbanan ekonomi yang dilakukan untuk memperoleh barang atau jasa. Secara umum, biaya dapat diartikan sebagai pengeluaran, baik dalam bentuk uang maupun nilai moneter lainnya. Levin, dalam pandangan Dinda, menjelaskan bahwa pembiayaan pendidikan adalah proses pemanfaatan pendapatan dan sumber daya yang tersedia untuk mengelola lembaga pendidikan di berbagai daerah dengan jenjang yang berbeda-beda.

Untuk lebih memahami mengenai satuan biaya, berikut ini adalah perbedaan rencana biaya pendidikan dan pendanaan pendidikan:

Rencana Biaya Pendidikan Adalah rincian perkiraan pengeluaran yang diperlukan oleh sekolah untuk membiayai operasional seperti, gaji guru, staff, pengadaan fasilitas dan perlengkapan, biaya pengembangan kurikulum, serta program-program lainnya. Rencana ini berfungsi sebagai panduan dalam pengelolaan anggaran agar efektif dan efisien.

Pendanaan Pendidikan adalah suatu proses untuk menyediakan sumber daya keuangan yang diperlukan guna memenuhi kebutuhan pendidikan, ini melibatkan identifikasi sumber pendapatan, alokasi dana, serta mekanisme pengelolaan dan pengawasan. Pendanaan dapat berasal dari berbagai sumber seperti, pemerintah atau swasta (Harahap et al., 2022).

Komponen Biaya Pendidikan

Komponen biaya pendidikan terdiri dari biaya operasional, biaya Investasi, dan biaya personal. Biaya operasional adalah pengeluaran rutin yang diperlukan untuk mendukung keberlangsungan kegiatan pendidikan di sekolah/madrasah. Biaya ini terbagi menjadi:

- a. Biaya operasional langsung, seperti gaji pendidik dan tenaga kependidikan beserta tunjangannya.
- b. Biaya bahan dan peralatan, termasuk alat pendidikan yang habis pakai.
- c. Biaya operasional tidak langsung, meliputi pengeluaran untuk listrik, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, komunikasi, pajak, asuransi, dan lain-lain

Biaya investasi mencakup pengadaan dan pengembangan sarana serta prasarana, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), serta modal kerja tetap. Sementara itu,

biaya personal mencakup biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik agar dapat mengikuti kegiatan pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan (Dj Nurkamiden & Anwar, 2023).

Kategori Biaya Pendidikan

Menurut Cohn dan Geske, biaya pendidikan dibagi sebagai berikut:

Biaya langsung (*direct cost*), yaitu biaya yang dikeluarkan oleh sekolah, siswa, dan wali murid. Dalam hal ini biaya yang dimaksud bisa kebutuhan siswa seperti alat tulis, buku, seragam, dan lain-lain, sedangkan biaya sekolah seperti gaji guru, perawatan fasilitas, dan penyediaan sarana belajar, kemudian untuk wali murid bisa seperti iuran bulanan sekolah, ekstrakurikuler, dan sebagainya.

Biaya tidak langsung (*indirect cost*), yaitu biaya diluar anggaran yang dikeluarkan oleh pihak sekolah, seperti biaya transportasi siswa yang tidak diadakan oleh sekolah, biaya makan siswa selama bersekolah, dan lain-lain.

Jenis Pendidikan, biaya pendidikan juga dapat dibedakan berdasarkan jenis institusi pendidikan, misalnya:

- a. Pendidikan formal seperti, sekolah dasar, menengah, dan perguruan tinggi.
- b. Pendidikan non formal yakni, kursus dan pelatihan keterampilan.
- c. Pendidikan Informal contohnya, belajar di rumah atau *homeschooling*.
- d. Tingkat Pendidikan dan jurusan juga mempengaruhi biaya yang dikeluarkan.

Cohn dan Geske membagi biaya pendidikan ke dalam berbagai kategori untuk memahami bagaimana dana dianggarkan dan digunakan dalam sistem operasional pendidikan. Pembagian ini membantu dalam perencanaan anggaran pendidikan agar lebih efisien dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik serta institusi pendidikan (Apriyani et al., 2022).

Dalam ilmu ekonomi, Biaya Tetap (*fixed cost*) adalah jenis biaya yang jumlahnya tetap dan tidak berubah, meskipun terjadi perubahan dalam volume kegiatan atau aktivitas, hingga mencapai tingkat aktivitas tertentu. Biaya Variabel (*variable cost*) merupakan biaya yang totalnya akan meningkat atau menurun secara proporsional sesuai dengan perubahan volume kegiatan atau aktivitas yang dilakukan.

Dengan ini bisa disimpulkan bahwa, biaya tetap adalah pengeluaran bisnis yang tidak tergantung pada produk yang dihasilkan dari bisnis tersebut. Pengeluaran ini berkaitan dengan waktu, seperti gaji atau biaya sewa yang dibayar tiap bulan atau tahun, dan sering disebut sebagai pengeluaran tambahan. Berbeda dengan biaya variabel yang

berkaitan dengan volume (dan dibayar per barang/jasa yang diproduksi) (Sherly et al., 2019).

Dalam konteks pendidikan, konsep mengenai pembiayaan juga bisa terganggu dengan adanya hambatan dalam mewujudkan sistem pendidikan yang berkualitas, berikut beberapa tantangan dalam pendanaan pendidikan meliputi berbagai hal di antaranya:

- a. Ketimpangan pendanaan, masih banyak adanya ketimpangan dalam pendanaan di daerah kota dan pedesaan, terutama di daerah terpencil.
- b. Keterbatasan Anggaran, hal ini akan menghambat jalannya pendidikan secara efektif.
- c. Korupsi dan Penyalahgunaan Dana, suatu kegiatan yang sangat keliru ini akan mengikis kualitas pendidikan secara perlahan tapi pasti.

Teknis Pengisian Rencana Pendanaan

Pengelolaan dana pendidikan merupakan proses yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dalam pengalokasian anggaran untuk berbagai program dan kegiatan pendidikan. Pengelolaan ini dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Sekolah (RKS) dan Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS).

RKS atau Rencana Kerja Madrasah (RKM) adalah dokumen perencanaan dengan jangka waktu empat tahun yang disusun oleh kepala madrasah, guru, staf, serta komite sekolah sebagai upaya meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Dari RKM ini, kemudian disusun Rencana Kegiatan Tahunan serta Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan, yang selanjutnya diwujudkan dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Madrasah (RAPBM) (Mujayaroh & Rohmat, 2020).

Sudarmono mengatakan, setiap tahun sekolah menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) yang menjadi rancangan atau perencanaan pendapatan dan penggunaan biaya kebutuhan operasional sekolah. Prioritas alokasi dana pendidikan meliputi peningkatan akses mutu, relevansi, dan tata kelola. Skala prioritas ini bertujuan untuk memastikan bahwa anggaran digunakan dengan sebaik mungkin untuk mencapai tujuan pendidikan nasional (Sudarmono et al., 2021).

Berikut beberapa contoh alokasi dana berdasarkan skala prioritas, yaitu peningkatan akses, mutu, dan tata kelola pendidikan. Peningkatan akses mencakup pembangunan atau rehabilitasi ruang kelas, kantor, bantuan biaya pendidikan, serta pendidikan kesetaraan untuk memastikan semua peserta didik mendapatkan kesempatan belajar yang layak. Selanjutnya, peningkatan mutu difokuskan pada pelatihan dan pengembangan guru, pengadaan sarana penunjang pembelajaran, serta pengembangan kurikulum guna meningkatkan kualitas pendidikan. Sementara itu, peningkatan tata kelola dilakukan

dengan memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana serta pengawasan yang lebih ketat dari pihak internal maupun eksternal agar dana pendidikan dapat digunakan secara efektif dan efisien (Dwianto et al., 2022).

Dalam penyusunan rencana pendanaan, diperlukan prinsip-prinsip dasar agar pengelolaan dana pendidikan dapat berjalan secara optimal. Keterbukaan dan transparansi menjadi prinsip utama, di mana rencana pendanaan harus disusun dengan jelas dan terbuka sehingga semua pihak yang terlibat dapat memahami alokasi serta penggunaannya. Selain itu, partisipasi wali murid juga penting untuk memastikan bahwa kebutuhan dan aspirasi mereka diperhatikan dalam penyusunan rencana pendanaan. Rencana tersebut juga harus selaras dengan kebijakan pendidikan nasional dan daerah agar mendukung tujuan jangka panjang sistem pendidikan (Amin Gani et al., 2024).

Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 48 menyatakan bahwa pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas publik. Disamping itu prinsip efektivitas juga perlu mendapat penekanan, sebab prinsip ini mengurai sejumlah ketepatan dalam penggunaan anggaran.

Efisiensi dan efektivitas perlu diterapkan guna mengoptimalkan penggunaan dana agar hasil yang dicapai efisien. Prinsip keberlanjutan harus diperhatikan agar program pendidikan dapat terus berjalan tanpa terganggu oleh keterbatasan anggaran. Selain itu, pengukuran dan evaluasi dilakukan melalui penyusunan indikator kinerja untuk menilai efektivitas penggunaan dana serta melakukan penyesuaian berdasarkan kebutuhan yang berkembang. Terakhir, fleksibilitas dalam rencana pendanaan menjadi aspek penting agar dapat beradaptasi dengan perubahan kondisi ekonomi, sosial, dan kebutuhan pendidikan di masa depan (Purwaningsih & Asriati, 2024).

Pada proses perencanaan pendidikan, para perencana juga harus tahu dari mana saja sumber pendanaan pendidikan di antaranya:

- a. Pemerintah: Sebagai penyedia utama dana pendidikan, pemerintah harus bertanggung jawab untuk menyediakan anggaran yang cukup untuk jalannya operasional dan pengembangan pendidikan.
- b. Swasta: Pihak swasta juga bisa terlibat dalam pembangunan pendidikan dengan berbagai program sosialnya seperti, beasiswa, pelatihan gratis, donasi, dan lain-lain.
- c. Masyarakat: Partisipasi Masyarakat dalam bentuk sumbangan, iuran, ataupun *fundraising*

Peran teknologi dalam pengelolaan dana dapat membantu tata kelola yang efektif dan efisien seperti mengurangi resiko penyalahgunaan dana serta memudahkan akses pembayaran (Sumual & Papising, 2024). Berikut adalah beberapa contoh nyata bagaimana teknologi dapat membantu:

a. Sistem Informasi Manajemen (SIM)

Transparansi dan Akuntabilitas: SIM memungkinkan pencatatan dan pelacakan alokasi dana secara real-time. Setiap transaksi dapat direkam dan diawasi oleh pihak berwenang, sehingga mampu mengurangi resiko penyalahgunaan anggaran.

Pelaporan Otomatis: SIM dapat menghasilkan laporan keuangan secara otomatis sehingga bisa memudahkan proses audit dan evaluasi penggunaan dana.

Integrasi Data: SIM dapat mengintegrasikan data dari berbagai sumber, seperti dana pemerintah, swasta, dan masyarakat, sehingga memudahkan pengelolaan dan analisis data keuangan.

b. Sistem Pembayaran Digital

Pengurangan Resiko Penyalahgunaan: Pembayaran digital mampu mengurangi penggunaan uang tunai, yang rentan terhadap penyalahgunaan atau kehilangan. Dan bisa merekam jejak transaksi yang jelas.

Kemudahan Akses: Sistem pembayaran digital memudahkan orang tua atau siswa dalam membayar biaya pendidikan, seperti uang sekolah, uang kegiatan, atau uang seragam, tanpa harus datang ke sekolah.

Efisiensi Waktu dan Biaya: Pembayaran digital mengurangi biaya administrasi dan waktu yang dibutuhkan untuk proses pembayaran manual.

c. Pemanfaatan Big Data

Pemetaan Kebutuhan: Big data dapat digunakan untuk memetakan kebutuhan pendidikan di berbagai daerah, sehingga alokasi dana dapat disesuaikan dengan kondisi lokal.

Evaluasi Program: Data yang terkumpul dapat dianalisis untuk mengevaluasi efektivitas program pendidikan dan menentukan area yang perlu perbaikan.

Dalam Menyusun rencana pembiayaan pendidikan, kita harus mengidentifikasi terlebih dahulu apa kebutuhan lembaga baik itu jangka pendek maupun jangka panjang. Setelah itu kita klasifikasikan kira-kira biaya apa aja yang dibutuhkan, misalnya:

a. Biaya langsung (buku, alat tulis, dan fasilitas belajar)

b. Biaya tidak langsung (gaji, pemeliharaan sarana dan prasarana, dan listrik)

Kemudian gunakan estimasi biaya dengan mengacu pada standar biaya yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau Lembaga terkait. Contoh: jika satuan biaya per-siswa untuk jenjang SMP Rp. 2.000.000/tahun, dan jumlah siswa 500 orang, maka total biaya yang dibutuhkan untuk siswa adalah Rp1.000.000.000.

Setelah itu Menyusun biaya yang lain seperti biaya personalia, operasional, pemeliharaan dan pengembangan. Tentukan juga sumber dana yang akan digunakan seperti: Dana BOS, iuran SPP, Donasi atau Hibah.

Jumlahkan semua komponen biaya untuk mendapatkan total kebutuhan dana, kemudian susun RAPBS sesuai dengan format yang telah ditentukan. Isi data dengan rinci setiap nominal pengeluaran dan sumber dana, pastikan RAPBS ditinjau dan disetujui oleh pihak berwenang, seperti komite sekolah dan kepala sekolah, dan terus lakukanlah monitoring untuk menghindari kesalahan. Berikut contoh format pembiayaan pendidikan:

Tabel 1

Komponen	Uraian	Jumlah (Rp)	Sumber Dana
Biaya Personalia	Gaji Guru	500.000.000	BOS + SPP
Biaya Operasional	Alat tulis, listrik, air	150.000.000	BOS
Biaya Pemeliharaan	Perbaikan meja dan kursi	50.000.000	Donasi Yayasan
Biaya Pengembangan	Pelatihan Guru	75.000.000	BOS
Total		775.000.000	

4. KESIMPULAN

Satuan biaya pendidikan merupakan aspek krusial dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan lembaga pendidikan. Definisi satuan biaya pendidikan mencakup berbagai aspek pembiayaan yang diperlukan untuk operasional sekolah maupun perguruan tinggi, seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2020. Biaya pendidikan terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu biaya operasional, biaya investasi, dan biaya personal, yang masing-masing memiliki peran penting dalam menunjang keberlangsungan pendidikan.

Pendanaan pendidikan juga diklasifikasikan menjadi biaya langsung dan tidak langsung, serta dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti jenis pendidikan, tingkat pendidikan, dan jurusan yang dipilih. Selain itu, tantangan utama dalam pendanaan pendidikan mencakup ketimpangan pendanaan antara daerah, keterbatasan anggaran, serta risiko korupsi dan penyalahgunaan dana. Oleh karena itu, pengelolaan dana pendidikan

memerlukan prinsip transparansi, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas untuk memastikan bahwa anggaran yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal.

Teknologi memainkan peran strategis dalam pengelolaan keuangan pendidikan, seperti melalui sistem informasi manajemen (SIM), sistem pembayaran digital, dan pemanfaatan big data. Dengan penerapan teknologi ini, pencatatan, pelaporan, dan analisis data keuangan dapat dilakukan secara lebih akurat dan efisien. Oleh karena itu, upaya peningkatan sistem keuangan pendidikan harus terus dilakukan agar dapat mengakomodasi kebutuhan peserta didik dan lembaga pendidikan secara berkelanjutan.

DAFTAR REFERENSI

- Albab, U. (2021). Perencanaan pendidikan dalam manajemen mutu terpadu pendidikan Islam. *TADBIR MUWAHHID*, 5(1).
- Ali, H., & Limakrisna, N. (2013). *Metodologi penelitian*. Deepublish.
- Alifia Taufika Rahmah, Ratnaningsih, S., & Nurochmin. (2023). Pengelolaan biaya operasional pendidikan Raudhatul Athfal Nurul Huda Bogor tahun pelajaran 2022/2023. *TADBIR MUWAHHID*, 7(2), 321–338. <https://doi.org/10.30997/jtm.v7i2.9711>
- Amin Gani, A., Hanifah, L., Lestari, D., & Nurkholis. (2024). Prinsip-prinsip pengelolaan dana pendidikan di sekolah. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 9(2).
- Apriyani, A., Safidah, N., Awilisni, S., & Hidayati, N. M. (2022). Sumber dana pendidikan berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia. *UNISAN Jurnal: Jurnal Manajemen dan Pendidikan*, 1(3).
- Dj Nurkamiden, U., & Anwar, H. (2023). Konsep manajemen pembiayaan pendidikan pada lembaga pendidikan Islam. *TADBIR: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 11(1), 53–64.
- Dwianto, R., Syapsan, & Ekwarso, H. (2022). Analisis pemanfaatan alokasi dana pendidikan pada APBD Kabupaten Kuantan Singingi untuk peningkatan mutu pendidikan manusia sektor pendidikan tahun 2011-2020. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 11(1), 1005–1019.
- Hafni, A. D., & Rahmawati, M. F. (2022). Pengelolaan keuangan pendidikan pada sekolah dasar di masa pandemi COVID-19. *JAMP: Jurnal Administrasi dan Manajemen Pendidikan*, 5(2).
- Harahap, S. A., Negeri, M. T., & Hilir, R. (2022). Pengelolaan biaya pendidikan madrasah. *Journal of Education and Teaching*, 3(2). <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/JETE>
- Hasanah, M., Sandy, P., Manan, M., & Nasucha, J. A. (2022). Analisis strategi perencanaan mutu satuan pendidikan di lembaga pendidikan Islam di Indonesia. *Attadrib: Jurnal*

Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, 5(2), 108–119.
<https://doi.org/10.54069/ATTADTRIB.V5I2.299>

Masbullah, A., Mudzafaroh, N., Hariyadi, A., & Dachlian, D. N. (2023). Implementasi manajemen keuangan sekolah dalam pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan. *Jurnal Agama Sosial dan Budaya*, 6(1), 2599–2473.
<https://doi.org/10.31538/almada.v6i1.2894>

Mujayaroh, M., & Rohmat, R. (2020). Pengelolaan dan pengalokasian dana pendidikan di lembaga pendidikan. *Arfannur*, 1(1), 41–54.
<https://doi.org/10.24260/arfannur.v1i1.151>

Nurhayati, N., Nasir, M., Mukti, A., Safri, A., Hasibuan, L., & Anwar, K. (2022). Manajemen pembiayaan pendidikan dalam meningkatkan mutu lembaga pendidikan Islam. *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 3(2). <https://doi.org/10.38035/jmpis.v3i2>

Purwaningsih, D., & Asriati, N. (2024). Pengelolaan keuangan pendidikan dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas sumber daya. *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Indonesia (JPPI)*, 4(4), 1723–1732.
<https://doi.org/10.53299/jppi.v4i4.757>

Ratna Sari, N., & Listiadi, A. (2021). Pengaruh literasi keuangan, pendidikan keuangan di keluarga, uang saku terhadap perilaku pengelolaan keuangan dengan financial self-efficacy sebagai variabel intervening. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 9(1).

Sherly, A., Widia, N., & Putri, A. M. (2019). Fixed cost analysis (case study in Pinochio stores in Duri) analisis biaya tetap (studi kasus pada toko Pinochio di Duri). *Research in Accounting Journal*, 1(2). <http://journal.yrpipku.com/index.php/raj>

Sudarmono, S., Hasibuan, L., & Us, K. A. (2021). Pembiayaan pendidikan. *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 2(1). <https://doi.org/10.38035/jmpis.v2i1>

Sumual, S. D. M., & Papising, Y. (2024). Strategi pengelolaan dana pendidikan pada SD YPK Erokwero Kabupaten Maybrat. *Jurnal Pendidikan Islam dan Pembelajaran*.
<https://journalpedia.com/1/index.php/jipp>